



HUBUNGAN PEMAHAMAN AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, PARTISIPASI, *VALUE FOR MONEY* DAN *GOOD GOVERNANCE* (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Lumajang)

Aries Iswahyudi^{a,*}, Iwan Triyuwono^b, M. Achsin^c

^{a,b,c}Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono 165, Malang, Jawa Timur-
Indonesia

*(aries_iswahyudi@ymail.com)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) menguji secara empiris pengaruh pemahaman akuntabilitas terhadap *good governance*. 2) menguji secara empiris pengaruh pemahaman transparansi terhadap *good governance*. 3) menguji secara empiris pengaruh pemahaman partisipasi masyarakat terhadap *good governance*. 4) menguji secara empiris pengaruh pemahaman *Value For Money* (VFM) terhadap *good governance*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori. Variabel dalam penelitian ini adalah akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan VFM, dengan variabel terikat adalah *good governance*. Populasi dalam penelitian ini yaitu SKPD Kabupaten Lumajang yang terkait dengan pelayanan publik. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah random bertingkat (*stratified random sampling*). Teknik analisis menggunakan regresi berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa *good governance* tidak berjalan dengan baik karena variabel akuntabilitas tidak berpengaruh secara positif, variabel VFM tidak berpengaruh secara positif. Sedangkan variabel partisipasi berpengaruh secara negatif dan variabel transparansi berpengaruh secara positif terhadap *good governance*.

Kata kunci: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, VFM, *good governance*

ABSTRACT

The purpose of this study is to 1) Test empirically the effect of accountability to the understanding of good governance. 2) Test empirically understanding the influence of transparency to good governance. 3) Test empirically understanding the influence of society participation to good governance. 4) Test empirically understanding the influence of Value For Money (VFM) to good governance. This study uses a quantitative approach with explanatory approach. The variables in this study are accountability, transparency, participation, and VFM, the dependent variable is good governance. The population in this study is SKPD Lumajang related to public services. The sampling technique used was stratified random (stratified random sampling). Techniques using multiple regression analysis. The results show that good governance does not work well because the variable does not affect positively accountability, variable VFM does not affect positively. While variable negatively affect participation and transparency variables affect positively to good governance.

Keywords: *accountability, transparency, participation, VFM, good governance*

PENDAHULUAN

Penerapan *good governance* ditujukan agar pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dapat berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari budaya korupsi, kolusi dan nepotisme. Konsep *good governance* semakin diisyaratkan untuk dilaksanakan pemerintah seiring dengan adanya reformasi yang menumbuhkan otonomi daerah (Amelia dkk., 2013).

Dari beberapa prinsip *good governance* yang digunakan berbagai institusi pemerintahan, terlihat bahwa prinsip yang melandasi *good governance* sangat bervariasi dan disesuaikan dengan kondisi institusional. Namun diantara berbagai adopsi, paling tidak terdapat sejumlah prinsip yang disepakati oleh institusi dan diakui sebagai karakteristik *good governance*, diantaranya yaitu prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kedua prinsip tersebut tidak dapat berjalan sendiri-sendiri karena terdapat hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi (CUI-ITB, 2004).

Akuntabilitas menjadi kunci dari *good governance* (Abdullah, 2010). Akuntabilitas menjadi salah satu unsur pokok dalam mewujudkan *good governance* (Wulandari, 2009).

Akuntabilitas juga telah menjadi topik yang menarik bagi pemerintahan, karena akuntabilitas telah berkembang dari sifat tradisional (akuntabilitas keuangan) menjadi beberapa prinsip, yaitu akuntabilitas administrasi, akuntabilitas politik, dan akuntabilitas sosial (Erkkila, 2007).

Prinsip transparansi memiliki kedudukan yang penting dalam implementasi konsep *good governance*. Melalui informasi yang transparansi, dan mudah diakses, akan memudahkan publik untuk memahami dan berpartisipasi secara nyata dalam proses-proses yang berkepentingan dengan publik. Transparansi informasi akan membuka ruang transaksi sosial antara stakeholder dengan pemerintahan (CUI-ITB, 2004).

Selain akuntabilitas dan transparansi, lembaga internasional United Nations Development Program (UNDP), dan the Asian Development Bank (ADB) menyatakan bahwa *good governance* yang baik harus melaksanakan minimal empat komponen dasar tata kelola yang baik, yaitu akuntabilitas, partisipasi, prediktabilitas (aturan hukum) dan transparansi. Akuntansi dan transparansi dianggap sebagai faktor utama untuk memastikan pemerintahan yang baik. Partisipasi

merupakan dukungan dari masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Prediktabilitas (aturan hukum) mengacu pada 1) adanya undang-undang, peraturan dan kebijakan untuk mengatur masyarakat serta 2) aplikasi dan konsistensi keadilan. Sedangkan empat komponen, akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan aturan hukum merupakan empat pilar yang secara universal berlaku, dan terlepas dari orientasi ekonomi dan prioritas kebijakan strategis (Waheduzzaman 2008).

Berdasarkan penelitian Mardiasmo (2003), *good governance* juga dipengaruhi oleh *value for money*. *Value for money* (VFM) merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan, untuk menghindari pengeluaran yang boros. Efisiensi merupakan pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu. Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Selain ketiga elemen tersebut, VFM juga harus didukung dengan keadilan dan pemerataan. Keadilan mengacu pada adanya

kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan layanan publik berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Sedangkan pemerataan merupakan penggunaan uang publik yang tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu, melainkan secara merata.

Good governance juga dipengaruhi oleh partisipasi. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya (UNDP, 1997). Partisipasi memiliki peran yang penting dalam meningkatkan *good governance* seiring dengan era otonomi daerah di Indonesia, yang memberikan keleluasaan lebih besar kepada daerah untuk merancang pembangunan daerah. Kewenangan yang dimiliki pemerintah dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat apabila pemerintah mampu membangun demokrasi pada tingkat lokal melalui peningkatan partisipasi publik dengan melibatkan masyarakat (Rahardian, 2010).

Penelitian mengenai *good governance* telah dilakukan oleh Dedy (2009) yang menemukan bahwa penerapan *good governance* yang baik akan meningkatkan kinerja pemerintahan. Penelitian Riantiarno

dan Azlina (2011) menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak terbukti memengaruhi kinerja pemerintahan, sementara akuntabilitas ketaatan terbukti memengaruhi kinerja pemerintahan. Badruzaman dan Chairunnisa (2012) menemukan bahwa implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berkorelasi kuat dengan penerapan *good governance*. Sementara Ani (2014) tidak mampu membuktikan adanya pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah dalam mewujudkan *good governance*. Beberapa hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya inkonsistensi pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintahan atau *good governance*, sehingga pengaruh akuntabilitas terhadap *good governance* perlu diuji ulang.

Pada jurnal CUI-ITB (2004) ditunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan dua prinsip yang dibutuhkan untuk melaksanakan *good governance*. Begitu juga dengan Huque (2011) yang menemukan bahwa akuntabilitas dari eksternal harus diperkuat untuk mewujudkan *good governance* di Bangladesh. Mardiasmo (2006) menyatakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan *good governance*. Beberapa

karakteristik pelaksanaan *good governance*, antara lain transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency dan effectiveness, serta accountability. Dari karakteristik tersebut, paling tidak terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yaitu terwujudnya transparansi, *value for money*, dan akuntabilitas. Waheduzzaman. (2008) menemukan bahwa partisipasi masyarakat yang efektif mempengaruhi *good governance*.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya isu bahwa *good governance* merupakan hal yang penting dalam mewujudkan pemerintahan yang berkualitas. Faktor yang dapat mempengaruhi *good governance* dan merupakan pilar umum dari *good governance* adalah akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Selain itu terdapat *value for money* yang merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik. Namun beberapa penelitian tersebut sebagian besar merupakan penelitian kualitatif, dan lebih melihat hubungan keempat variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi, prediktabilitas, maupun *Value for money* (VFM) dengan kinerja pemerintahan. Oleh karenanya penelitian ini berupaya mengembangkan beberapa penelitian

tersebut, dengan pendekatan kuantitatif, sehingga dapat dibuktikan secara statistik pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi, maupun *value for money* (VFM) dengan *good governance*.

TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*):

Dasar *Good Governance*

Teori keagenan (*agency theory*) menyatakan bahwa pada umumnya semua pemegang saham yang termasuk dalam level manajemen memiliki kepentingan tersendiri (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam sektor publik, hubungan keagenan dilihat sebagai hubungan pendelegasian (Asmara, 2010). Hubungan keagenan di pemerintahan melibatkan eksekutif, *legislative* dan *public* (*voters*). Legislatif mendelegasikan otoritas atau kewenangan kepada eksekutif sebagai *expert agent* untuk melaksanakan suatu tindakan (*action*). Legislatif juga berposisi sebagai agen dari pemilih atau *public*, karena mereka adalah representasi dari *public* yang diberi kewenangan untuk membuat keputusan tentang penggunaan dana-dana *public*. *Public* adalah *principal* bagi eksekutif dan *legislative*, dikatakan bahwa *public*

disebut juga *the ultimate principals* (Asmara, 2010).

Pada konteks pemerintahan, *principal-agent* dapat ditelusuri dari proses anggaran, pemilih-legislatur, legislatur-pemerintah, menteri keuangan-pengguna anggaran, perdana menteri-birokrat, dan pejabat-pemberi pelayanan. Hal ini menjelaskan bahwa hubungan keagenan terlihat dari hubungan pendelegasian (*chains of delegation*), yaitu pendelegasian dari masyarakat kepada wakilnya di parlemen, dari parlemen ke pemerintah, dari pemerintah sebagai kesatuan kepada menteri dan dari pemerintah kepada birokrasi. Hubungan tersebut tidak selalu mencerminkan hirarki, tetapi dapat saja berupa hubungan pendelegasian (Abdullah, 2009)

Permasalahan keagenan dalam pemerintahan antara lain adalah dalam konteks pembuatan kebijakan publik, termasuk penganggaran, *oportunitas* agen dapat berupa *rent seeking* ataupun korupsi. Apabila aktivitas tersebut dilaksanakan selama proses pengalokasian sumberdaya maka keputusan yang mendominasi adalah keputusan politik, bukan ekonomi atau administratif, sehingga disebut korupsi politis (*political corruption*) dan ketika dilakukan setelah anggaran ditetapkan atau saat

anggaran dilaksanakan, maka keputusan ekonomi atau *administrative* lebih dominan daripada keputusan politik sehingga oportunitas disebut korupsi administrative (*administrative corruption*) (Asmara, 2010).

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk memonitor masalah kontrak dan membatasi perilaku *opportunistic* manajemen adalah *corporate governance*. Prinsip-prinsip pokok *corporate governance* yang perlu diperhatikan untuk terselenggaranya praktik *good governance* adalah transparansi, akuntabilitas, keadilan dan responsibilitas. *Good governance* diarahkan untuk mengurangi asimetri teori antara principal dan agent (Arief, 2013).

Good Governance

Good governance ini lahir sejalan dengan konsep-konsep dan terminologi demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. *Good governance* muncul akibat semakin kompleksnya permasalahan, seolah menegaskan bahwa tidak adanya iklim pemerintah yang baik dan didorong dalam reformasi sektor publik.

Oleh para teoritis dan praktisi administrasi negara Indonesia, istilah "*good governance*" telah diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya, penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (Bintoro Tjokroamidjojo), tata-pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (LAN), dan ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih (*clean government*) (Efendi, 2005).

Dasar hukum *good governance* pada institusi pemerintah Indonesia yang pertama adalah TAP MPR. No VII/MPR/2001 tentang Penyelenggaraan Negara yang baik dan bersih. Tujuan penerapan *good governance* dalam pemerintahan adalah agar operasi dari instansi pemerintah dapat berjalan secara efektif dan efisien, dan pencapaian sasaran dari perusahaan dapat tercapai (Sari dan Raharja, 2012).

Hubungan Akuntabilitas dan Good Governance

Akuntabilitas diterapkan dalam pemerintahan seiring dengan meningkatnya peran swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan serta adanya perubahan besar dalam manajemen sektor publik. Penerapan akuntabilitas ini dimunculkan oleh

Osborne dan Gaebler dalam bukunya *Reinventing Government* di tahun 1992.

Perubahan manajemen tersebut pada dasarnya diarahkan pada penciptaan manajemen publik yang handal dan mempertajam serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi publik. Dengan mengembangkan konsep manajemen publik yang fleksibel dan berorientasi kepada pasar. Paradigma manajemen sektor publik yang baru menuntut birokrasi pemerintahan dibuat efisien dan efektif sehingga pemerintahan dapat bergerak fleksibel dalam mengikuti tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan. Paradigma ini merupakan solusi yang mengacu pada kaidah-kaidah terhadap *New Public Management* (NPM) (Indreswari, 2011).

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada yang memberi mandat. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan, sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi. Lembaga pemerintahan dalam hal ini adalah eksekutif (presiden beserta kabinetnya),

yudikatif (MA dan sistem peradilan) dan legislatif (MPR dan DPR) (Abdullah, 2010). Uraian tersebut menjelaskan bahwa akuntabilitas akan dapat meningkatkan *good governance*, karena adanya pertanggungjawaban dari pihak yang diberi mandat kepada pemberi mandat. Melalui akuntabilitas tercipta pengawasan kekuasaan dari lembaga pemerintahan.

Akuntabilitas merupakan salah satu unsur pokok perwujudan *good governance* yang saat ini sedang diupayakan di Indonesia. Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif. Akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional dan perspektif sistem akuntabilitas (Sadjiarto, 2000).

Berdasarkan uraian tersebut maka ditetapkan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Pemahaman akuntabilitas berpengaruh positif terhadap *good governance*

Hubungan Transparansi dan Good Governance

Sebagaimana penerapan akuntabilitas, penerapan transparansi dalam pemerintahan

juga karena adanya adopsi *New Public Management* (NPM). Prinsip transparansi dalam NPM mengindikasikan adanya kebebasan dan kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai bagi mereka yang memerlukan informasi, mutakhir dapat diandalkan, mudah diperoleh dan dimengerti (Indreswari, 2011).

Menurut Mardiasmo (2000) transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan lainnya yang digunakan untuk pengambilan keputusan pihak – pihak yang berkepentingan (Rahmamuhammad, 2008).

Prinsip transparansi menghendaki adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam penyajian informasi (Hapsari, 2011). Dapat dikatakan bahwa melalui transparansi akan menjamin terwujudnya *good governance* dengan cara pemerintah harus menghasilkan informasi yang berkualitas sehingga

menimbulkan kepercayaan bagi semua pihak yang berkepentingan.

Transparansi dalam pelaksanaan pemerintah daerah mensyaratkan keterbukaan pihak pemerintah daerah dalam proses pembuatan keputusan atau kebijakan atau pelaporan – pelaporan atas kerjanya sehingga publik dapat mengetahui, mengkaji dan memberikan masukan serta mengawasi pelaksanaan pemerintahan. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah dengan masyarakat sehingga dapat mewujudkan *good governance* di daerah (Lukow, 2013). Berdasarkan uraian tersebut maka ditetapkan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Pemahaman transparansi berpengaruh positif terhadap *good governance*

Hubungan Partisipasi dan Good Governance

Dalam konsep *new public management* (NPM) keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan juga tidak terlepas dari partisipasi aktif anggota masyarakat. Masyarakat Daerah baik secara kesatuan sistem maupun sebagai individu merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan daerah karena secara prinsip

penyelenggaraan otonomi daerah ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera (selamat, 2013).

Prinsip partisipasi diartikan sebagai jaminan kesamaan hak bagi setiap individu dalam pengambilan keputusan (baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan). Pelaksanaan prinsip partisipasi mengharuskan pemerintah untuk meningkatkan fungsi kontrol terhadap manajemen pemerintahan dan pembangunan dengan melibatkan organisasi non pemerintah. Melalui hubungan dengan organisasi non pemerintah diyakini akan dapat menjalin hubungan yang lebih baik dengan masyarakat (Indreswari, 2011).

Partisipasi memastikan pemerintahan lebih transparan, akuntabel, dan dapat diprediksi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa adanya partisipasi masyarakat yang semakin tinggi dalam program pembangunan, akan meningkatkan *good governance* (Waheduzzaman, 2008). Partisipasi masyarakat yang efektif akan meningkatkan transparansi dalam pembangunan, akuntabilitas atas otoritas pelaksana, dan sesuai dengan hukum setempat sehingga pada akhirnya menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) (Waheduzzaman, 2008)

Partisipasi akan menjadi efektif bila pemberdayaan masyarakat mencapai posisi yang memungkinkan tindakan kooperatif dan kolektif yang akan dilakukan dengan badan pelaksana (pemerintah), sehingga dapat meningkatkan pengambilan keputusan, monitoring dan evaluasi proses (Brett, 2003; Cooper et al, 2006; Waheduzzaman, 2009). Berdasarkan uraian tersebut maka ditetapkan hipotesis sebagai berikut:
H₃: Pemahaman partisipasi rakyat berpengaruh positif terhadap *good governance*

Hubungan Value For Money (VFM) dan Good Governance

Sektor publik sering dinilai sebagai sarang pemborosan, sumber kebocoran dana, dan instansi yang selalu merugi. Oleh karena itu tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya.

Penelitian Mardiasmo (2006) menyimpulkan bahwa akuntansi manajemen harus dapat memberikan informasi yang relevan dan handal melalui *strategic planning, strategic cost management*, dan *strategic management accounting* untuk dapat menerapkan NPM, melaksanakan *value for money* untuk penentuan biaya dan harga layanan

publik, serta pengukuran kinerja pengelolaan dalam kerangka *best value performance* dan *public sector scorecard*.

Value for Money merupakan prinsip pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasar pada tiga elemen utama (Mardiasmo, 2009) yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. *Value for Money* dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Ekonomi adalah pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan dengan menghindari pengeluaran yang boros. Efisiensi merupakan pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*. Ketiga hal tersebut merupakan elemen pokok *Value For Money* yang saling terkait. Ketiga elemen tersebut perlu ditambah dengan dua elemen lagi

yaitu keadilan (*equity*) dan pemerataan atau kesetaraan (*equality*). Keadilan mengacu pada adanya kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan layanan publik berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Selain keadilan, perlu dilakukan distribusi secara merata. Artinya, penggunaan uang publik hendaknya tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata dengan keberpihakan kepada seluruh rakyat (Mardiasmo, 2006). Berdasarkan uraian tersebut maka ditetapkan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Pemahaman *value for money* berpengaruh positif terhadap *good governance*

METODE

Penelitian ini tergolong *explanatory*, yaitu penelitian yang mencoba menjelaskan fenomena yang ada (Hartono, 2005:12). Populasi dalam penelitian ini yaitu SKPD Kabupaten Lumajang yang terkait dengan pelayanan publik. Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda.

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *good governance* (Y) yang didefinisikan sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi

dan sosial untuk tujuan pembangunan (Krina, 2003). Indikator tercapainya *good governance* dapat dilihat dari kualitas *good governance*, sehingga Indikator *good governance* menurut Krina (2003) adalah 1) Perekonomian daerah semakin baik; 2) Kesejahteraan masyarakat yang semakin baik; 3) Kondisi sosial masyarakat yang semakin baik; dan 4) Tercapainya pembangunan dengan merata

Sedangkan variabel independen (X) yang diajukan dalam penelitian ini yaitu Akuntabilitas (X_1). Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pemegang jabatan publik atas keputusan dan tindakan yang dibuat untuk masyarakat (Krina, 2003). Indikator akuntabilitas adalah 1) Proses pembuatan sebuah keputusan yang dibuat secara tertulis; 2) Kebijakan yang tersedia bagi warga yang membutuhkan; 3) Keputusan yang diambil memenuhi standar etika dan nilai yang berlaku; 4) Keputusan yang diambil memenuhi prinsip-prinsip administrasi yang benar; 5) Kejelasan dari sasaran atas kebijakan yang dibuat dan dikomunikasikan; 6) Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program; 7) Kelayakan dan konsistensi dari

target operasional maupun prioritas; 8) Penyebar luasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media massa; dan 9) Sistem manajemen dan monitoring hasil

Transparansi (X_2), adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai (Juliastuti, 2013). Transparansi memiliki dua aspek yaitu: 1) komunikasi publik oleh pemerintah dan 2) hak masyarakat terhadap akses informasi (Mardiasmo dalam Juliastuti, 2013). Juliastuti (2013) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui indikator berikut ini: 1) Pemberian informasi oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan kebijakan anggaran yang telah disusun; 2) Kemudahan dokumen-dokumen kebijakan anggaran yang telah disusun oleh pemerintah daerah untuk diketahui oleh publik; 3) Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggung jawaban; 4) Kemampuan transparansi anggaran dalam meningkatkan dan mengakomodasikan usulan; dan 5) Adanya sistem penyampaian informasi anggaran kepada publik.

Partisipasi (X_3), adalah fungsi informasi melalui mana orang dapat datang untuk berbagi visi pembangunan, membuat pilihan, dan mengelola kegiatan. Indikatornya adalah sebagai berikut: 1) menginformasikan; 2) konsultasikan; 3) Pelibatan; dan 4) pemberdayaan (Waheduzzaman. 2009).

Value For Money (X_4), merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2006). Indikator *value for money* adalah: (Mardiasmo, 2000). Indikatornya adalah: 1) Pengelolaan organisasi publik bernilai ekonomis, yaitu dengan biaya terendah dengan hasil *output* yang tinggi; 2) Pengelolaan organisasi publik efisien sesuai standar kinerja yang telah ditetapkan; 3) Pengelolaan organisasi publik efektif yaitu pencapaian hasil program sesuai target yang ditetapkan; 4) Tercapainya tujuan dan sasaran program pembangunan; 5) Kebijakan yang dibuat bermanfaat bagi masyarakat; 6) Kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan; dan 7) Adanya alternatif yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis yang dilakukan di beberapa SKPD di Kabupaten Lumajang (Tabel 1) menunjukkan bahwa pelaksanaan *good governance* terutama dipengaruhi oleh transparansi dan partisipasi. Berperannya aspek transparansi dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Lumajang akan meningkatkan terwujudnya *good governance* dikarenakan aparat telah menyediakan akses informasi yang jelas mengenai prosedur-prosedur, penggunaan biaya, dan pertanggungjawaban atas kegiatan/program yang dilaksanakan. Serta telah disediakan akses untuk pengaduan terkait pelanggaran aturan atau permintaan uang suap dan bekerjasama dengan media massa untuk meningkatkan arus informasi.

Begitu juga dengan aspek partisipasi memberikan pengaruh yang baik terhadap tercapainya *good governance*, selama partisipasi masyarakat tidak terlalu besar. Hal ini karena partisipasi masyarakat yang tinggi, dapat meningkatkan biaya yang mengakibatkan tidak efisien. Selain itu partisipasi yang besar akan membutuhkan waktu yang lama untuk menampung aspirasi, sehingga akan

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi

Variabel	β	t	Sig t
Konstanta	15,603		
Akuntabilitas	0,052	0,659	0,512
Transparansi	0,189	1,774	0,079
Partisipasi	-0,338	-3,289	0,01
VFM	0,035	0,061	0,557
F		3,398 (Sig. 0,012)	
R ²		0,131	
Adj R ²		0,093	

Sumber: Hasil Analisis Data SPSS

memperlambat pengambilan kebijakan. Dengan kata lain partisipasi masyarakat yang tinggi akan menjadikan pelaksanaan *good governance* menjadi menurun atau kurang baik, karena tidak efisien dalam biaya maupun pengambilan keputusan dalam penetapan kebijakan. Hal ini karena semakin banyaknya partisipasi rakyat, menyebabkan banyaknya masukan dan ide-ide yang kemungkinan bertentangan antar masyarakat atau kelompok masyarakat. Sehingga akan sulit mewujudkan suatu kebijakan yang memenuhi semua keinginan masyarakat, dan terdapatnya banyak hambatan dalam pelaksanaan program tersebut. Kondisi ini pada akhirnya akan mengurangi dan menghambat pencapaian *good governance*. Hal ini karena dalam partisipasi kadang-kadang

menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan.

Walaupun akuntabilitas dan *value for money* diakui turut mempengaruhi pelaksanaan *good governance*, namun karena kurangnya kemampuan SDM dalam memahami prinsip-prinsip akuntabilitas sehingga dalam pelaksanaannya akuntabilitas tidak dapat diterapkan secara maksimal dalam operasional beberapa SKPD. Sementara VFM lebih menekankan kepada tercapainya kinerja sektor publik, khususnya kinerja keuangan, sehingga kurang mencerminkan pencapaian *good governance* secara keseluruhan dari SKPD yang ada di Kabupaten Lumajang. Keterbatasan kemampuan SDM yang rendah dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan ekonomis, terlihat dari adanya anggapan bahwa kinerja pemerintah

hanya dianggap di penyerapan anggaran mencapai 100%.

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN PENELITIAN

Berdasarkan Keterbatasan dalam penelitian ini maka disarankan peneliti selanjutnya untuk:

1. Menambah variabel dependen yang digunakan pada penelitian selain variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan VFM, karena banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi *good governance*.
2. Memperluas populasi penelitian dengan mengembangkan beberapa daerah sehingga penelitian dapat merepresentasikan hasil penelitian dengan lebih baik.

REFERENSI

- Abdullah, Syukriy. 2009. *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi*. Oktober 13, 2009. [www.syukriy.wordpress.com/.../hubungan-dan-masalah-keagenan-di-pemerint...13 Okt 2009](http://www.syukriy.wordpress.com/.../hubungan-dan-masalah-keagenan-di-pemerint...) - Oleh: Abdul Halim (Universitas Gadjah Mada) dan Syukriy Abdullah ... *Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi*. Oktober ...
- Abdullah, Syukry. 2010. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntabilitas Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. 12 Januari 2010. www.syukriy.wordpress.com/.../pewujudan-transparansi-da...
- Amelia, Ira, Desmiyawati dan Nur Azlina. 2013. *Pengaruh Good Governance, Pengendalian Intern Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan)*. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Riau. Pekanbaru. Hal 1-15.pdf.
- Arief, Anggyansyah. 2013. *Teori Keagenan (Agency theory)*. Selasa 8 Januari, 2013. www.anggyansyah.blogspot.com/2013/01/teori-keagenan-agency-theory.html.
- Asmara, Jhon Andra. 2010. Analisis Perubahan Alokasi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*. Vol 3. No. 2. Juli 2010. Hal 155-172.
- Badruzaman, Jajang dan Irna Chairunnisa. 2012. Pengaruh Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terhadap Penerapan Good Governance. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya. *Jurnal ipi* 4115. Hal 1-22.pdf.
- CUI-ITB. 2004. Keterkaitan Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pencapaian Good Governance. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*. Vol.15. No. 1. 2004. Hal 34-47.pdf.
- Dedy, Somantri Yusuf. 2009. *Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bandung*. Tugas Penelitian. Jurusan Akuntansi Politeknik Pos Indonesia Bandung. Hal 1-28.pdf.

- www.asp.trunojoyo.ac.id/.../Pengaruh-Good-Governance-Terhadap-Kinerja-Pe..
- Efendy, Sofyan. 2005. "Membangun Good Governance". Diakses melalui situs <http://sofian.staff.ugm.ac.id/artikel/membangun-good-governance.pdf>, tanggal 20 desember 2015.
- Erkkila, Tero. 2007. Governance And Accountability- A shift in conceptualization. University of Helsinki. Jurnal PAQ SPRING. Pp 1-38.pdf.
- Hapsari, Indri. 2011. Hubungan Antara Good Corporate Governance Dan Transparansi Dengan Kinerja Perusahaan. Hal 1-25.pdf. www.eprints.undip.ac.id/27390/1/JURNAL.pdf.
- Hartono, Jogiyanto. 2008. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi V, BPFE, Yogyakarta.
- Huque, Ahmed Shafiqul. 2011. Accountability and governance: strengthening extra-bureaucratic mechanisms in Bangladesh. *Emerald Journal: International Journal of Productivity and Performance Management*. Vol 60. No. 1. Pp 59-74. Q Emerald Group Publishing Limited. 1741-0401. DOI 10.1108/17410401111094312.
- Indreswari, Meidyah. 2011. *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Edisi Keenam. Pdf.
- Jensen, M. C dan Meckling. W. H. 1976. The Agency Theory of Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3 (4): 305-360.
- Juliastuti, Ayu. 2013. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada DPRD Kota di Provinsi Sumatera Barat). Jurnal Akuntansi 11 Maret. Vol I. No. 1. Hal 1-27.pdf.
- Krina, Loina Lalolo. 2003. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Sekretariat Good Public Governance. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta. Agustus.pdf.
- Mardiasmo, 2006. Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol 2. No. 1. Mei 2006*. Hal 1-24.pdf.
- Mardiasmo. 2003. *Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Saran Good Governance*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Ekonomi. Universitas Gajah Mada. 29 September 2003. Yogyakarta. pdf.
- Mardiasmo.2000. Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah: Implementasi *Value for Money* Audit Sebagai Antisipasi Terhadap Tuntutan Akuntabilitas Publik. *JAAI*, Vol. 4, 1 Juni, 2000
- Rahadian, Achmad Hidayat. 2010. Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmiah STIAMI*. Hal 57-70.pdf.

- Rahmanurrasjid, Amin. 2008. *Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik di Daerah (Studi di Kabupaten Kebumen)*. Program Magister Ilmu Hukum. Program Pasca Sarjana. Universitas Diponegoro. Semarang.pdf.
- Riantiarno, Reynald dan Nur Azlina. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu). *Pekbis Jurnal. Vol 3. No. 3. November 2011*. Hal 560-568.pdf.
- Sadjiarto, Arja. 2000. Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol 2. No. 2. November 2000*. Hal 138-150.pdf.
- Sari, Maylia Pramono dan Raharja. 2012. *Peran Audit Internal Dalam Upaya Mewujudkan Good Corporate Governance (GCG) Pada Badan Layanan Umum (BLU) di Indonesia*. Universitas Negeri Semarang. pdf.
- Selamat, Melani Dwiyantri. 2013. Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Suatu Studi pada Sekretariat daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro). Hal 1-10. www.ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/.../1558.
- UNDP. 1995. Human Development Report 1995. New York: Oxford University Press
- Waheduzzaman. 2008. *Good Governance In Democratic Developing Countries: A Paradox*. Journal School of Management. Victoria University. Melbourne. Australia. Page 1-8.pdf. www.mngt.waikato.ac.nz/departments/.../airaanz/.../Waheduzzaman.pdf
- Wulandari, Suci. 2009. Persepsi Users Atas Akuntabilitas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Surakarta). STIE IEU Yogyakarta. Jurnal Studi Akuntansi Indonesia Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Hal 60-74.pdf.